

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu yang menggambarkan variabel-variabel yang akan diteliti, selanjutnya kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara variabel *dependent* dan variabel *independent*, serta diikuti oleh hipotesis penelitian.

2.1.1 Tenaga Kerja

2.1.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah proses produksi. Tenaga kerja menjadi lebih penting dari pada sarana produksi lainnya meliputi bahan mentah, air, tanah dan lain sebagainya dikarenakan manusia sendiri yang menggerakkan seluruh sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan sebuah barang sebagai hasil produksi (Meilasari, 2020). Tenaga kerja adalah setiap orang yang siap dan mampu melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun untuk masyarakat secara umum. Namun, tidak semua orang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja. Hanya orang-orang yang mempunyai kriteria tenaga kerja yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja menjadi bagian dari faktor produksi, oleh karena itu tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Tanpa adanya tenaga kerja, dapat dipastikan kegiatan perekonomian di suatu negara akan lumpuh dan tidak berjalan, sehingga membuat warga negaranya menjadi

terlantar dan kemiskinan di negara tersebut akan bertambah (Pratama & Hidayah).

Menurut (Rosyidi, 2014), tenaga kerja atau *human reources* itu tidak hanya di lihat dari yang mempunyai kemampuan terdidik saja melainkan yang tidak mempunyai kemampuan tidak terdidikpun itu tenaga kerja, jadi istilah tenaga kerja itu terkumpulnya semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya suatu proses produksi barang dan jasa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun atau lebih. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih, sedangkan penduduk berumur dibawah 15 tahun digolongkan bukan tenaga kerja. Berikut komposisi penduduk dan tenaga kerja (Payaman J. Simanjuntak, 2001).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat batas usia kerja yang berlaku, yakni dari usia 15 tahun sampai 64 tahun. Tenaga kerja di Indonesia terbagi dalam beberapa klasifikasi, yakni berdasarkan penduduknya, batas kerja dan kualitasnya. Ketenagakerjaan di Indonesia sendiri sepenuhnya diatur oleh Undang-Undang ketenagakerjaan (Gautama et al.). Tenaga kerja atau yang disebut Penduduk Usia Kerja (PUK) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang bekerja dibagi

menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Menurut BPS (2000), bekerja merupakan kegiatan melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah, sementara yang dimaksud dengan mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan. Penduduk yang mencari pekerjaan dibagi menjadi penduduk yang pernah bekerja dan penduduk yang belum penuh bekerja. Penduduk yang tidak aktif secara ekonomi digolongkan dalam kelompok bukan angkatan kerja yang terdiri dari kelompok mereka yang bersekolah, kelompok yang mengurus rumah tangga yaitu mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah dan golongan lainnya (Suaib & Agustina, 2022).

2.1.1.2 Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Dalam pasar kerja terdapat permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply for labor*) pada tingkat upah tertentu. Adapun yang dimaksud permintaan tenaga kerja adalah kebutuhan yang sudah di dasarkan atas ketersediaan membayar upah tertentu sebagai imbalannya. Jadi dalam permintaan tenaga kerja disini sudah ikut dipertimbangkan tinggi rendahnya upah yang berlaku di masyarakat atau yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan. Tingkat permintaan tersebut ditentukan oleh daya beli konsumen, pembeli modal dan pemerintah, serta seberapa besar mereka akan menggunakan daya belinya (Rohman, 2020).

Permintaan pada perusahaan terhadap tenaga kerja *derived demand* berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang atau

konsumen membeli suatu barang karena barang tersebut memberikan nikmat kepada konsumen. Akan tetapi pengusaha atau perusahaan mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat (konsumen). Dengan kata lain, pertambahan permintaan pengusaha atau perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung dari tingkat pertambahan permintaan konsumen atau masyarakat terhadap barang maupun jasa yang diproduksinya (Rohman, 2020).

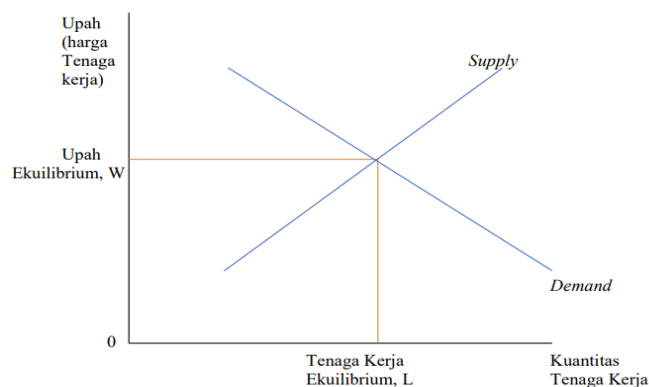
Besaran tingkat permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh bertambahnya atau tumbuhnya jumlah total pekerjaan yang tersedia dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jenis pekerjaan itu sendiri. Apabila semakin tinggi atau semakin banyak lapangan pekerjaan maka akan semakin meningkat permintaan akan tenaga kerja. Jika dilihat dari segi jenis pekerjaannya peningkatan permintaan tenaga kerja akan meningkat apabila di suatu pekerjaan tersebut mengalami kenaikan jumlah produksi yang diinginkan perusahaan tersebut, sehingga akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja.

Berbeda dengan penawaran tenaga kerja yang muncul dari *trade off* masing-masing individu antara bekerja dan bersantai. Di kehidupan masyarakat selalu mengalami *trade off*. Namun mungkin tidak ada *trade off* lain yang lebih ketara dan lebih penting dalam kehidupan manusia daripada *trade off* antara bekerja dan bersantai. Semakin panjang waktu yang digunakan untuk bekerja, maka semakin sedikit waktu luang yang dimiliki (Mankiw, 2003). Penawaran tenaga kerja didefinisikan dengan jumlah orang yang tersedia dan dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada tingkat upah tertentu. Jika

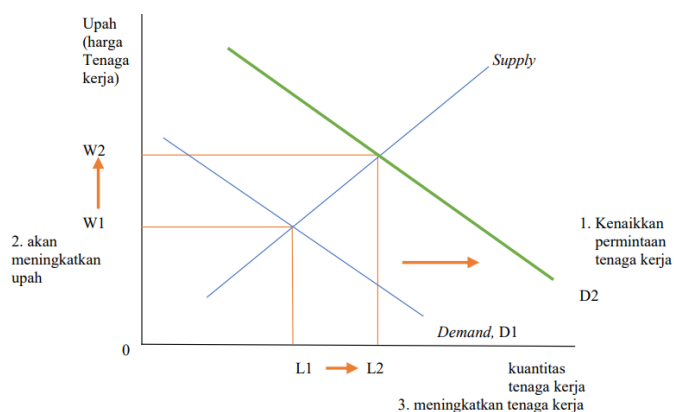
dikaitkan dengan sektor ekonomi, penawaran tenaga kerja berasal dari rumah tangga.

Dalam pasar barang dan jasa, apabila harga naik maka permintaan akan semakin sedikit, namun sebaliknya penawaran akan semakin banyak. Pada tingkat keseimbangan akan terbentuk jumlah permintaan yang sama dengan jumlah penawaran. Dalam pasar kerja, proses tersebut hampir sama, namun permintaan dan penawarannya berupa tenaga kerja dan harga barang/jasa menjadi tingkat upah. Oleh sebab itu upah sering disebut dengan harga tenaga kerja.

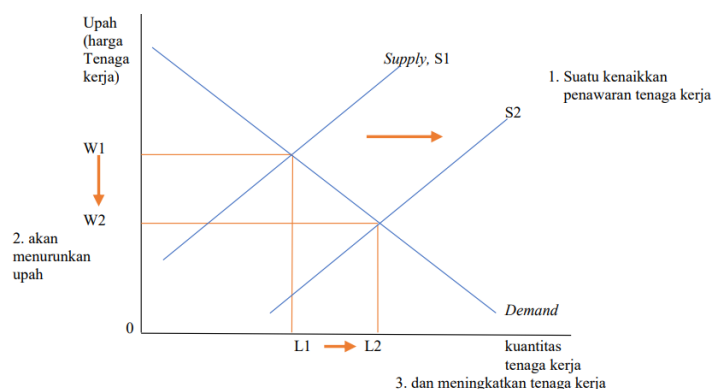
Jika upah mengalami peningkatan, maka penawaran tenaga kerja akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika upah mengalami penurunan, maka penawaran tenaga kerja akan menurun (Yasin & Ethicahwati, 2007). Keseimbangan pasar tenaga kerja serta pergeseran permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja



Gambar 2.2 Pergeseran dalam Permintaan Tenaga Kerja



Gambar 2.3 Pergeseran dalam Penawaran Tenaga Kerja

Menurut Nicholson (1998) dalam (Suksiwa, 2007) keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan kondisi yang menggambarkan adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kesesuaian tersebut bukan hanya dalam jumlah dan tingkat upah, tetapi juga implisit di dalamnya mengenai berbagai karakteristik tenaga kerja yang dibutuhkan pasar seperti keterampilan, pendidikan, dan sebagainya.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam hal produksi dan jasa, maka kualitas yang dimiliki haruslah baik untuk mendukung tingkat produksi maupun jasa yang lebih baik pula. Biasanya terjadi penurunan jumlah tenaga kerja saat tingkat upah semakin naik, hal tersebut terjadi karena faktor

substitusi. Misalnya di perusahaan memiliki karyawan dengan upah yang cukup tinggi namun kualitas dan perilaku yang dimiliki dapat merugikan karyawan tersebut karena terlalu bersantai sehingga mempengaruhi produktifitas di perusahaan.

2.1.1.3 Teori Tenaga Kerja

Adam Smith merupakan tokoh utama dalam aliran ekonomi klasik, menyatakan bahwa kekayaan dalam suatu negara akan meningkat seiring dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang digunakan. Sumber utama pendapatan berasal dari produksi yang melibatkan tenaga kerja dan sumber daya ekonomi. Harga suatu barang, menurut pandangan Smith, ditentukan oleh keunggulan mutlak dari barang tersebut. Keunggulan mutlak ini mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dengan efisiensi dan pemanfaatan teknologi yang baik. Dalam teorinya yang berjudul *Labor Theory of value*, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dalam produksi suatu barang, maka nilai barang tersebut akan semakin tinggi. Kesejahteraan suatu negara diukur berdasarkan jumlah barang yang di produksi, yang seringkali melibatkan penggunaan tenaga kerja yang besar dalam proses produksi.

David Richardo merupakan salah satu tokoh utama mazhab ekonomi klasik yang mengemukakan bahwa dalam pemanfaatan teknologi pertanian kurang di perhatikan akan tetapi ia percaya bahwa tenaga kerja adalah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yaitu pengangguran. Dalam teori nilai kerja (*Labor Theory of value*),

nilai dari suatu barang yang diproduksi ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam pembuatan barang yang diproduksi tersebut.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Tenaga Kerja

Menurut Tyas (2020) penggolongan tenaga kerja yang ada di lapangan dilakukan berdasarkan klasifikasi ketenagakerjaan menurut kriteria yang telah ditentukan yaitu berdasarkan kualitasnya atau menurut tingkat pendidikan dan keterampilan atau pengalaman yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja yaitu:

1) Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang tertentu yang diperoleh dengan cara bersekolah atau menempuh Pendidikan formal maupun informal. Contohnya: dosen, dokter, guru, pengacara dan lain-lain.

2) Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu yang diperoleh melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terlatih ini dibutuhkan latihan secara berulang kali, sehingga mereka mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: ahli bedah, mekanik, apoteker, dan lain-lain.

3) Tenaga Kerja tidak Terdidik dan tidak Terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga yang mereka miliki saja. Contohnya: buruh angkut, kuli bangunan, pembantu rumah tangga dan lain-lain.

2.1.1.5 Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Todaro (2003) penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja.

Menurut Kuncoro (2002) penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan dengan adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Jhon Maynard Keynes mengembangkan teori yang berlandaskan pada kekuatan keseimbangan pasar, dimana produksi yang seimbang akan menghasilkan daya beli yang cukup untuk barang-barang yang diproduksi. Di sisi lain, teori klasik berpendapat bahwa pasar akan mencapai keseimbangan dengan sendirinya dan pengangguran dapat diatasi dengan memanfaatkan sumber daya, terutama tenaga kerja. David Ricardo juga menyatakan bahwa pertumbuhan populasi akan memengaruhi pasokan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja proses di mana individu yang mencari pekerjaan diterima untuk melakukan tugas yang sesuai dengan kualifikasi mereka atau adanya kesempatan kerja karena ada lowongan pekerjaan yang tersedia (Todaro, 2003). Jumlah tenaga kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan dapat sama atau bahkan lebih kecil dari jumlah total peluang pekerjaan yang tersedia. Jika

jumlah peluang pekerjaan sesuai dengan jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan, maka tidak akan ada situasi pengangguran. Namun, jika jumlah pekerja yang mendapatkan pekerjaan lebih kecil daripada jumlah peluang pekerjaan yang ada, maka akan muncul situasi di mana sebagian orang akan mengalami pengangguran (Febriyanto, 2014).

2.1.1.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja

Faktor yang berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya ditinjau secara nasional dan secara wilayah/daerah. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Persoalan pertumbuhan ekonomi atau *economic growth* telah mendapat perhatian yang besar sejak munculnya ilmu ekonomi (Dona et al., 2018).

(Nicholson, 1995), dalam teori Pasar Tenaga Kerja dan Dampak Upah Minimum menjelaskan bahwa tenaga kerja dalam perekonomian ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Keseimbangan mekanisme pasar kerja ini akan menghasilkan tingkat upah dan tenaga kerja keseimbangan. Kenaikan dalam penawaran tenaga kerja yang didorong oleh bertambahnya angkatan kerja akan menyebabkan penurunan dalam tingkat upah dan keanikan dalam penyerapan tenaga kerja. Pergeseran keseimbangan pasar kerja ini didasarkan pada asumsi, jika sektor rill memiliki rencana untuk melakukan ekspansi produksi.

Menurut (Sudarsono, 1988), permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu lapangan usaha. Faktor-faktor

yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah, nilai produksi dan investasi. Perubahan pada faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diserap suatu lapangan usaha. Tingkat upah akan mempengaruhi tingkat biaya produksi.

Menurut (Muana Nanga, 2001), inflasi yang terjadi pada perekonomian di suatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitas inflasi yang terjadi.

Menurut (Payaman J. Simanjuntak, 1998), menyatakan bahwa pengusaha memperkerjakan seseorang karena itu untuk membantu produksi barang/jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksi.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian suatu daerah. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai total akhir yang diperoleh oleh perekonomian daerah tersebut, nilai total produk akhir yang dihasilkan baik oleh penduduk lokal maupun orang asing yang tinggal di negara tersebut,

sehingga ukuran umum yang sering dipakai untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi adalah rasio perubahan Produk Domestik Regional Bruto skala nasional atau rasio perubahan Produk Domestik Regional Bruto skala provinsi atau kabupaten atau kota (Pratama & Hidayah, 2023).

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh oleh berbagai unit atau sektor produksi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Produk domestik regional bruto dapat mempengaruhi angkatan kerja, dengan asumsi bahwa ketika nilai produk domestik regional bruto meningkat, nilai tambah dari total produksi atau penjualan semua unit ekonomi di wilayah tersebut meningkat. Peningkatan produksi atau penjualan suatu perusahaan mendorong perusahaan untuk meningkatkan permintaan akan tenaga kerjanya, sehingga produksi dapat ditingkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan yang terjadi (Kriskurnia, 2023).

2.1.2.2 Cara Perhitungan PDRB

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi, yaitu:

1) Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud adalah sewa tanah, upah dan gaji, keuntungan dan bunga modal. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun dalam dua bentuk, yaitu:

a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

PDRB Atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi, pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu (disebut tahun dasar). Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya. (BPS,2017:27).

b. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB ADHB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sector perekonomian di suatu wilayah. PDRB ADHB menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. (BPS, 2017:27).

2) Pendekatan pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, dari:

- a. Impor netto
- b. Ekspor netto (ekspor dikurangi impor)
- c. Perubahan Stok

- d. Pembentukan modal tetap domestic bruto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)
- e. Konsumsi pemerintah
- f. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)

3) Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi sembilan sektor dan lapangan usaha, yaitu:

- a. Perdagangan, hotel dan restoran
- b. Bangunan dan konstruksi
- c. Listrik, gas, dan air bersih
- d. Industri pengolahan
- e. Pertambangan dan penggalian
- f. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
- g. Jasa keuangan, Real estate (persewaan) dan jasa perusahaan
- h. Jasa-jasa lainnya

2.1.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang dihasilkan bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2018:16). Menurut Todaro dan Smith, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan

kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin besar. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan sekunder. Untuk menentukan ukuran pendapatan riil masyarakat tersebut menggunakan indikator tingkat pertumbuhan PDB (Tambunan 2017:38).

Mankiw (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

2.1.2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1) Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ini sudah lama dikembangkan oleh kaum klasik, dalam ajaran ini masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasakan terbaik untuk dilakukan, menurut Adam Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi pada kondisi full employment dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai pada posisi Stasioner. Posisi ini terjadi apabila sumber daya alam (SDA) telah seluruhnya dimanfaatkan, pengangguran pun jika ada hanya bersifat sementara, dan pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri kegiatan ekonomi, tugasnya hanya menciptakan

kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian.

2) Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan yang dikemukakan Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Harrod-Domar menggap bahwa analisis Keynes kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah ekonomi jangka panjang. Teori ini bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (*steady growth*) dalam jangka panjang. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal. Bila diasumsikan terdapat hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal dengan GNP total atau Y , maka setiap tambahan neto terhadap stok modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan pendapatan nasional.

3) Teori Schumpeter

Schumpeter berpendapat bahwa system ekonomi kapitalis merupakan landasan pembangunan dan sistem ekonomi yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut Schumpeter pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang

digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta.

4) Teori Lewis

Menurut Lewis, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan sektor kapitalis atau pertumbuhan sektor industri. Pertumbuhan sektor kapitalis atau industri akan menyebabkan sebagian pekerja di sektor pertanian pindah ke sektor industri atau kapitalis. Syarat yang dibutuhkan untuk menjadikan sektor kapitalis atau industri sebagai mesin pertumbuhan adalah dengan meningkatkan investasi di sektor tersebut. Pada saat yang bersamaan upah pekerja di sektor industri atau kapitalis harus ditetapkan lebih tinggi dari sektor pertanian karena akan menarik pekerja dari sektor pertanian ke sektor industri atau kapitalis.

2.1.3 Upah Minimum

2.1.3.1 Pengertian Upah Minimum

Upah Minimum adalah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha untuk membayar upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Menurut undang-undang ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, upah pekerja tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Dalam Undang-undang tersebut menekankan bahwa semua pekerja

berhak memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya (Meilasari, 2020).

Upah minimum yaitu upah yang merupakan suatu standar minimum dalam pemberian upah yang bisa digunakan untuk pelaku usaha, pemilik modal dan pelaku industri, untuk memberikan gaji atau upah yang berada didalam perusahaannya (Safitri & Desmintari, 2022). Tujuan adanya penetapan upah minimum kabupaten atau kota agar para pekerja dapat menghasilkan penghasilan yang layak untuk mereka yang merupakan sebagai balas jasa untuk tenaga yang diberikan oleh tenaga kerja terhadap pihak perusahaan yang telah menggunakan jasa mereka (Kawet et al., 2019).

Upah yang diterapkan pemerintah daerah berpengaruh pada permintaan pasar kerja. Dari perubahan tersebut mempunyai dampak kepada tenaga kerja pada sektor tertentu kedalam sektor yang lainnya. Sektor industri pengolahan menjadi penopang dalam pengembangan industri suatu negara. Agar dapat mewujudkan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan sektor industri yang dijadikan sektor pemimpin, tetapi bisa diperoleh oleh semua lapisan masyarakat. Sektor industri pengolahan merupakan media yang dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang melimpah, sehingga mampu menyerap tenaga yang cukup tinggi (Warapsari et al., 2020).

2.1.3.2 Teori Upah

1) Teori Klasik

Menurut teori klasik dalam pendapat Misesian bahwa di pasar bebas, pengangguran yang terjadi adalah pengangguran sukarela.

Manusia bekerja karena memilih untuk mengantisipasi atas hasil pekerjaannya ketimbang menyalakan tenaganya atau penghasilan/manfaat fisik yang diperoleh seandainya ia memutuskan tidak bekerja. Ia akan berhenti bekerja pada suatu titik, saat ia merasa bahwa menikmati waktu senggangnya tidak lagi berarti penyalakan kesempatan kerja atau saat manfaat waktu senggangnya dianggap lebih berharga daripada penambahan kepuasan yang mungkin didapat seandainya ia bekerja terus dan dalam kata lain adalah pengangguran sukarela.

2) Teori Keynes

Menurut Teori Keynes dimulai dengan menyatakan secara keliru teori klasik tersebut yang mengasumsikan bahwa dalam pengertian yang ketat, pengangguran nonsukarela tidaklah ada. Teori klasik tidak berasumsi demikian. Teori klasik mengasumsikan bahwa secara logis/praksiologis, pengangguran nonsukarela tidak mungkin terjadi selama pasar beroperasi secara bebas. Bahwa pengangguran nonsukarela, dalam segala tingkatannya, dapat terjadi jika terdapat institusi-institusi ekstra-pasar, seperti misalnya peraturan tentang upah minimum, tidaklah pernah diragukan secara serius.

2.1.3.3 Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi

Upah adalah hak/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan/jasa yang telah dilakukan (Galih Prihandani Utomo, n.d.). Untuk masing-masing provinsi, besaran UMP ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 6 (1) Gubernur menetapkan UMP, (2) UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November.

Dalam penetapan upah minimum, institusi yang paling berperan adalah Dewan Pengupahan yang berfungsi merumuskan besaran upah minimum yang menjadi dasar penetapan upah minimum oleh Kepala Daerah. Dewan Pengupahan adalah sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menetapkan upah minimum dan menerapkan sistem pengupahan serta menyiapkan bahan perumusan sistem pengupahan. Dewan ini terdiri atas tripartit dengan model keterwakilan berimbang yang melakukan perundingan setiap tahun untuk menetapkan besaran nilai upah minimum. Dasar utama untuk mendapatkan angka usulan kenaikan upah minimum adalah survei harga pasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) (Syarifa Mahila, 2015).

2.1.4 Investasi

2.1.4.1 Pengertian Investasi

Investasi menurut Sukirno (2015) adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam

perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang.

Investasi ini memiliki 3 (tiga) peran, yaitu:

- 1) Investasi merupakan salah satu pengeluaran agregat, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.
- 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini menumbuhkan pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja.
- 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat. Investasi adalah salah satu metode yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah upaya dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang serta mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 1991).

Menurut Agustin (2020) investasi adalah dana yang dikeluarkan oleh investor untuk membiayai kegiatan produksi atau pembangunan yang menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi terbentuk dari penanaman modal secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak untuk tujuan memperbesar output. Investasi atau penanaman modal dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara bahkan di suatu wilayah. Investasi sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal untuk membeli barang dan perlengkapan produksi untuk memperbesar kemampuan

dalam kegiatan produksi barang dan jasa yang terdapat di perekonomian (Meilasari, 2020). Investasi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang berkelanjutan dapat meningkatkan suatu kegiatan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran dikehidupan Masyarakat (Qodari, 2021).

2.1.4.2 Teori Investasi

Menurut Manurung (2013) para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi, yaitu:

- 1) Menurut Harrod-domar, melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan output. Sumber dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (pendapatan nasional) yang di tabung. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya stok modal akan bertambah di masa yang akan datang.
- 2) Menurut Keynes, mengemukakan bahwa besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga. Terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga tersebut. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh sesuatu rumah tangga, makin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan olehnya. Apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak mengalami perubahan, perubahan yang cukup besar dalam tingkat

bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti keatas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga tersebut

2.1.4.3 Jenis-Jenis Investasi

Menurut Salim & Budi (2015) jenis-jenis investasi dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Investasi berdasarkan asetnya

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Real asset, yaitu investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya.
- b. Financial asset merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

2) Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang di dasarkan pada faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi.

3) Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya (Undang-Undang No 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing; Undang-undang No 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri).

4) Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh.

5) Investasi berdasarkan bentuknya

investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi.
- b. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli modal, atau mengakuisi perusahaan.

2.1.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Menurut Ibrahim (2014) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, terdiri dari tingkat keuntungan yang akan diperoleh, tingkat suku bunga, ramalan kondisi di masa depan, dan kemajuan teknologi. Berikut ini akan dibahas masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi tersebut, yaitu:

1) Tingkat Keuntungan Yang Akan Diperoleh

Investor akan menanamkan modalnya pada jenis investasi yang memberikan prospek yang baik dan menguntungkan. Bila investasi yang dipilih sudah tidak menguntungkan lagi, investor akan berpindah pada jenis lain yang lebih menguntungkan. Investor harus selalu mengamati kinerja perusahaan tempat ia menanamkan modalnya. Naik turunnya saham, dapat menjadi indikator apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak.

2) Tingkat Suku Bunga

Investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Hubungan antara investasi dengan suku bunga adalah negatif. Bila suku bunga tinggi, maka jumlah investasi menurun. Begitu pula sebaliknya, jumlah investasi akan semakin banyak pada saat tingkat suku bunga relative rendah.

3) Ramalan Kondisi Di Masa Depan

Apabila diramalkan kondisi ekonomi di masa yang akan datang menggairahkan dan memiliki prospek yang menguntungkan, maka akan mendorong pertumbuhan investasi. Pertumbuhan yang tinggi dan tingkat harga yang stabil menjadi pemicu laju investasi. Semakin baik kondisi perekonomian akan meningkatkan tingkat keuntungan para pengusaha.

4) Kemajuan Teknologi

Teknologi tinggi dan tepat guna mampu meningkatkan produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perusahaan, dan pada akhirnya akan dinikmati oleh pekerja. Meningkatnya pendapatan akan mendorong jumlah konsumsi, sehingga mendorong laju investasi. Bila kondisi ini tercipta secara terus menerus akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

2.1.5 Inflasi

2.1.5.1 Pengertian Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai peningkatan yang berkelanjutan dalam harga-harga umum dari berbagai barang, atau sebagai penurunan kontinu dalam daya beli mata uang. Semakin tinggi tingkat kenaikan harga, semakin

rendah nilai mata uang akan menjadi. Pengukuran umum untuk inflasi menggunakan "indeks harga konsumen", yang didasarkan pada kumpulan harga berbagai barang yang dipilih untuk mewakili pola belanja konsumen (Pioh et al., 2021).

Pada umumnya, inflasi merujuk pada situasi dimana seluruh harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus menerus. Menurut (Rezandy & Yasin, 2022) Inflasi dapat diartikan sebagai kondisi di mana tingkat umum harga-harga mengalami peningkatan. Penjelasan ini dimaksudkan untuk mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat menurun dan, pada intinya, terjadi penurunan nilai aktual mata uang negara tersebut. Menurut (Rezandy & Yasin, 2022) mengemukakan bahwa saat tingkat inflasi meningkat, harga-harga barang dan jasa yang dihasilkan atau ditawarkan oleh suatu negara akan mengalami kenaikan. Hal ini berpotensi mengurangi daya saing barang dan jasa tersebut, serta dapat berakibat pada penurunan ekspor.

2.1.5.2 Teori Inflasi

1) Teori Keynes

Inflasi dapat terjadi dikarenakan masyarakat yang ingin memenuhi kehidupannya diatas kesanggupan finansialnya. Probabilitas besar akan terjadi apabila gap infalasi akan masih ada dikarenakan faktor pendukung tidak ditegakan. Oleh karenanya sama seperti pandangan kaum monetarist. Keynesian model ini lebih banyak diterapkan untuk menjelaskan fenomena inflasi pada suatu wilayah dalam jangka pendek.

2) Teori Strukturalis

Teori ini menganalisis akibat dari terjadinya inflasi atas kelakuan struktur perekonomian, berfokus pada bagian suplai barang yang di ekspor serta kebutuhan pangan. Dikarenakan penyebab pada struktur peningkatan bahan pokok produksi yang sangat lama daripada tingkat perkembangan kebutuhan masyarakat, maka terjadi kesulitan devisa serta kenaikan harga kebutuhan pangan. Sehingga berakibat pada naiknya harga barang komoditi lain, nantinya akan berdampak pada inflasi terjadi relative yang berkelanjutan apabila tidak segera dibenahi khususnya pada industri barang ekspor dan pembangunan sektor penghasil bahan pangan.

2.1.5.3 Jenis-Jenis Inflasi

Jenis Inflasi Menurut Sifatnya:

a. *Creeping Inflation* (inflasi merayap)

Biasanya *creeping inflation* di tandai dengan laju inflasi yang rendah (<10%). Kenaikan harga berjalan dengan lambat, dengan presentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.

b. *Galloping Inflation* (inflasi menengah)

Di tandai dengan naiknya harga yang cukup besar dan ada kalanya juga berjalan dalam waktu yang cukup pendek serta memiliki sifat yang akselerasi. Ialah ketika harga-harga minggu atau bulanan ini lebih tinggi daripada yang minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Dampaknya bagi perekonomian lebih besar dari pada inflasi yang merayap (*creeping inflation*).

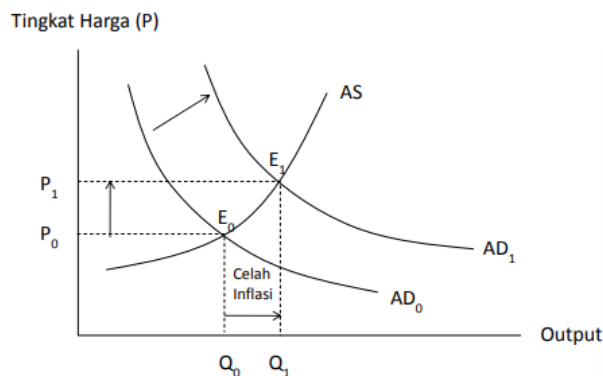
c. *Hyper Inflation* (inflasi tinggi)

Inflasi tinggi yang sangat parah dampaknya. Karena semua harga naik 5 sampai 6 kali. Masyarakat tidak lagi berniat memegang uang. Nilai uang akan menurun sangat tajam sehingga ingin digantikan dengan barang yang lain. Pergeseran uang akan makin cepat, harga akan naik secara akselerasi. Biasanya, kondisi seperti ini akan muncul ketika pemerintah mengalami kekurangan anggaran belanja yang dibelanjai atau di tutup dengan mencetakuang.

Jenis Inflasi Menurut Sebabnya:

a. Inflasi Sisi Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi seperti ini berawal dari timbulnya kenaikan permintaan total (*agregat demand*), sehingga penghasilan ini sudah ada pada kondisi peluang kerja penuh. Didalam kondisi peluang kerja penuh ini. Naiknya permintaan total sembari naiknya harga juga akan dapat memperbesar hasil produksi (*output*). Jika peluang kerja penuh (*full employment*) sudah tercapai, peningkatan permintaan berikutnya bisa saja akan menaikkan harga. Jika kenaikan permintaan ini menimbulkan pemerataan GNP yang ada di atas GNP dipeluang kerja penuh amak bisa terdapat "*inflationary gap*". *Inflationary gap* ini yang bisa menimbulkan inflasi.



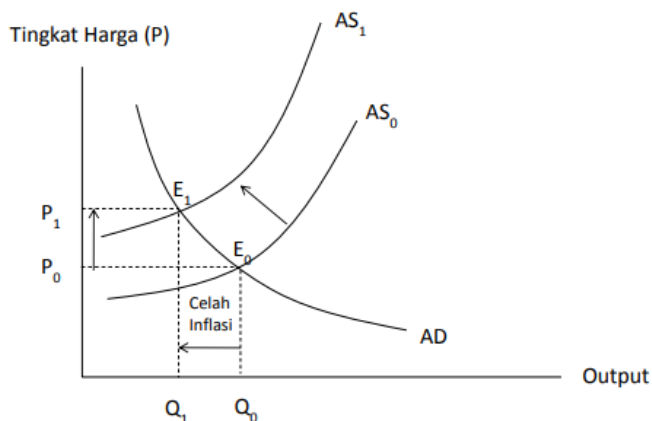
Sumber: (Prawoto, 2014)

Gambar 2. 4 Inflasi Yang Disebabkan Tarikan Permintaan

Proses terbentuknya inflasi tarikan permintaan awalnya berada pada tingkat ekuilibrium, yaitu perpotongan kurva *aggregate supply* (AS) dan AD_0 pada titik E_0 . Tingkat harga pada keadaan ini adalah P_0 pada sumbu vertikal. Kemudian dimisalkan peningkatan pengeluaran yang akan mendorong kurva AD_0 bergeser menjadi AD_1 sehingga terjadi titik keseimbangan yang baru pada titik E_1 . Pada jumlah permintaan yang lebih besar ini akan mengakibatkan harga naik menjadi P_1 . Inflasi tarikan permintaan ini terjadi akibat banyaknya pengeluaran uang yang dibatasi penawaran barang-barang yang bisa dihasilkan oleh perekonomian dalam penggunaan tenaga kerja penuh.

b. Inflasi Sisi Penawaran (*Cost Push Inflation*)

Cost Push Inflation biasanya ditandai dengan adanya kenaikan harga serta turunya produksi. Jadi, inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini biasanya di mulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*agregat supply*) sebagai akibat kenaikan biasya produksi



Sumber: (Prawoto, 2014)

Gambar 2. 5 Inflasi Yang Disebabkan Tarikan Penawaran

Inflasi desakan biaya terjadi bila kenaikan biaya menggeser kurva AS. Dimisalkan keseimbangan awal berada pada titik E_0 dimana titik tersebut adalah merupakan titik perpotongan antara AS_0 dengan AD. Pergeseran kurva AS_0 menjadi AS_1 yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi akan mengakibatkan perubahan pada keseimbangan yang baru yaitu dititik E_1 dimana harga akan meningkat menjadi P_1 dan output yang lebih rendah yaitu pada Q_1 .

2.1.5.4 Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan atau jasa yang dibayar oleh konsumen di suatu wilayah. Perhitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang atau jasa yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat setempat (Statistik, n.d.). Fungsi angka indeks adalah sebagai petunjuk kondisi perekonomian secara umum (Saputra, Mariani Jaya Setiawan, Adi Mahatma, n.d.) oleh

karena itu IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun dan kontrak lainnya.

Laju Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah laju inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan permintaan barang dan jasa (permintaan agregat) dalam perekonomian, beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab laju inflasi yang bersifat permanen adalah interaksi antara ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Ada beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) antara lain Indeks Laspeyres, Indeks Paashe, Indeks Fisher. Namun formula yang biasa dipakai di banyak negara termasuk Indonesia adalah Indeks Laspeyres sebagai berikut:

$$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} \cdot Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{oi} \cdot Q_{oi}}$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

IHK_n : Indeks periode ke n

P_{ni} : Harga jenis barang i , periode ke n

$P_{(n-1)i}$: Harga jenis barang i periode ke $(n - 1)$

$(n-1)i \cdot Q_{oi}$: Nilai konsumsi jenis barang i , pada tahun dasar

k : Jumlah jenis barang paket komoditas

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang

akan dilakukan penulis. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan. Ringkasan penelitian terdahulu terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanik Istiyani ¹ , Rafael Purtomo ² dan Achmad Fadillah Maulana ³ , (2022) Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Kualitas Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018.	Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB	Upah Minimum, Kualitas Penduduk	UMK memiliki pengaruh tidak signifikan negatif dimana lebih besar dari Tingkat signifikan. PDRB dan Kualitas Penduduk berpengaruh signifikan positif. Hasil dari koefisien determinasi (R^2), variabel bebas UMK, PDRB dan Kualitas Penduduk berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu jumlah penduduk bekerja di provinsi Jawa Timur 2014-2018.	Jurnal Ekulibrium Volume 6 No.1
2.	Retno Wilis, (2016) Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan 2008- 2013.	Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi	Pengeluaran Pemerintah, UMK	Upah berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi tidak signifikan pada lapangan kerja terdidik, pekerjaan yang tidak berpendidikan dan tidak terlatih. Investasi tidak pengaruh signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap lapangan kerja terdidik dan tidak terdidik.	Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 3 No. 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Desi Meilasari (2020) Pengaruh UMP, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Di Pulau Jawa.	Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB, UMP, Investasi	Lokasi Penelitian	UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Pulau Jawa tahun 2010-2016. Sedangkan PDRB dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Pulau Jawa tahun 2010-2016.	Jurnal Investasi Islam Volume 5 No. 2
4.	Marselino Yuda Pratama ¹ , Dewi Rahmi ² dan Ina Amaliah ³ , (2022) Pengaruh Investasi, Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2020.	Penyerapan Tenaga Kerja, Upah Minimum Provinsi, Investasi	Indeks Pembangunan Manusia	Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan, Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.	Jurnal <i>Economics Studies</i> Volume 2 No. 1
5.	I Gusti Agung Indradewa (2015) Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali.	Penyerapan Tenaga Kerja, Inflasi, PDRB, UMP	Lokasi Penelitian	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sementara inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.	E-Journal Ekonomi Pembangunan Volume 4 No. 8
6.	Kartiko Dhian ¹ , Firdayetti ² , (2022) Determinasi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah 2015-2020.	Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB	UMR, Jumlah Usaha Mikro Kecil	UMR dan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Jumlah Usaha Mikro Kecil memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan.	Jurnal Ekonomi Trisakti Volume 2 No. 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Septa Tri Setyo ¹ dan Whinarko Juliprijanto ² , (2023) Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 1997-2021.	Penyerapan Tenaga Kerja, UMP	PMDN, PMA	Upah Minimum Provinsi, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penanaman Modal Asing secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	Jurnal Jendela Inovasi Daerah Volume 6 No. 1
8.	Azza Arni Muhira ¹ dan Edi Irawan ² , (2023) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2022.	Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB	UMK, Rata-rata Lama Sekolah	PDRB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Volume 3 No. 1
9.	Mahdalena ¹ dan Ruddy Syafrudin ² , (2022) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertambangan Kecamatan Batulicin.	Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi	Produksi, UMK,	Produksi, Investasi dan Upah berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Kecamatan Batulicin tahun 2010-2019.	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Volume 5 No. 2
10.	Jonatan Banurea, (2022) Pengaruh PDRB, Investasi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Medan	Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB	Upah Minimum Kota	PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, Upah Minimum Kota (UMK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	<i>Journal of Social Science and Digital Marketing</i> Volume 2 No. 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Emil Abdhal Hafiz ¹ , Ria Haryatiningsih ² , (2020) Pengaruh PDRB, UMK, IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020.	Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB,	UMK, IPM	PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, UMK berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan IPM berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, secara simultan seluruh variabel independen memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Jawa Barat.	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Volume 1 No..1
12.	Dewi M. Sabihi ¹ , Anderson G. Kumenaung ² , Audie O. Niode ³ (2021) Pengaruh UMP, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Manado.	Penyerapan Tenaga Kerja, UMP, Investasi	Pertumbuhan Ekonomi	Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 21 No. 1
13.	Ghaly Muhammad ¹ , Drs. Ec. Marseto, M,Si ² , (2023) Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur.	Penyerapan Tenaga Kerja, Inflasi, PDRB, Upah Minimum	Lokasi Penelitian	Inflasi dan UMP positif namun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, PDRB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.	Jurnal EK&BI Volume 6 No. 1
14.	Cahyanda Nofrita ¹ , Marwan (2022) Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat.	Penyerapan Tenaga Kerja, UMP, Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi,	UMP berpengaruh positif signifikan, Inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat.	Jurnal Salingka Nagari Volume 1 No. 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Desy Mayangsari (2018), Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Investasi, Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Samarinda.	Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi	Jumlah Unit Usaha, UMK	Jumlah unit usaha berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, investasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan upah berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Kota Samarinda.	Jurnal FEB Unmul Volume 2 No. 2
16.	Esthi Bhakti ¹ , Wahyu Hidayat ² , Arfida Boedirochmi ³ , (2020) Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur.	Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB, Inflasi, Upah Minimum	Lokasi Penelitian	Secara parsial inflasi memiliki hubungan yang negatif tidak signifikan sedangkan PDRB dan upah minimum memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri. Secara simultan inflasi, PDRB, dan upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Volume 4 No. 2

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang berisi rangkuman dari seluruh teori dalam penelitian ini, dimana konsep singkat proses penelitian dijabarkan dalam kerangka penelitian. Di dalam penelitian ini, digunakan variabel independen yaitu PDRB sektor industri pengolahan, UMP, Investasi sektor industri pengolahan, Inflasi dan variabel dependen yaitu Penyerapan Tenaga Kerja di sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat. Untuk mempermudah proses penelitian, maka dibuat kerangka berpikir yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diambil, sebagai berikut:

2.3.1 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan melalui investasi dalam sumber daya manusia, inovasi, dan peningkatan produktivitas. Ketika suatu daerah meningkatkan PDRB-nya melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan teknologi, ini dapat menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan. Peningkatan produktivitas juga dapat mengarah pada peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Penelitian Pramusinto & Daerobi (2020) PDRB, ditemukan bahwa PDRB mempunyai dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. PDRB mencerminkan nilai total produksi atau penjualan di berbagai sektor ekonomi dalam suatu daerah. Ini berarti jika PDRB naik, maka jumlah produksi juga meningkat, mendorong perusahaan untuk merekrut lebih banyak pekerja guna dapat menambah produksi dan penjualan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Saraswati at al. (2022), Jaya & Kholilah (2020), Sitompul & Simangunsong (2019), dan Buchari (2017).

2.3.2 Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja sebagai karyawan dan buruh. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi dari perusahaan. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang akan mengakibatkan perusahaan menaikkan biaya per unit barang yang di

produksi. Dengan kenaikan biaya barang yang diproduksi akan mengakibatkan para konsumen mengurangi tingkat konsumsinya bahkan tidak membeli barang yang bersangkutan karena mengalami kenaikan harga. Akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual, produsen terpaksa mengurangi jumlah produksi yang tentunya akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Dengan naiknya harga upah tenaga kerja, perusahaan akan mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang relatif murah untuk mempertahankan keuntungan maksimum. Hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk menggantikan pekerja manusia dengan teknologi atau otomatisasi, serta mengalami penurunan pertumbuhan bisnis karena sulit untuk menambah jumlah karyawan atau meningkatkan produksi dengan biaya yang lebih tinggi.

Upah dianggap menjadi beban bagi perusahaan. Semakin tinggi upah yang ditetapkan, maka semakin rendah keuntungan perusahaan, yang menyebabkan penurunan tenaga kerja yang diserap. Menurut Meilasari (2020) dan Dewi M. Sabihi dan Anderson G. (2021) mengungkapkan bahwa upah minimum menunjukkan pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.3.3 Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum, investasi meliputi pertumbuhan barang dan jasa dalam Masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, dan sebagainya. Investasi tidak hanya

untuk memaksimalkan *output* tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar, yang menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tenaga kerja tetapi juga dapat memperbesar kapasitas produksi. Dengan adanya investasi maka ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena investasi yang banyak akan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Investasi adalah kegiatan membeli modal berupa komoditas yang tidak dapat digunakan tetapi dapat dipakai nantinya guna bahan produksi masa mendatang. Menurut penelitian Andi Wijaya (2014), Qodari (2022), dan Darsana (2020) dengan adanya investasi memungkinkan perekonomian suatu wilayah dapat memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga mampu menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut. Berdasarkan pernyataan diatas, investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja ketika barang dan jasa lebih banyak dihasilkan.

2.3.4 Hubungan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

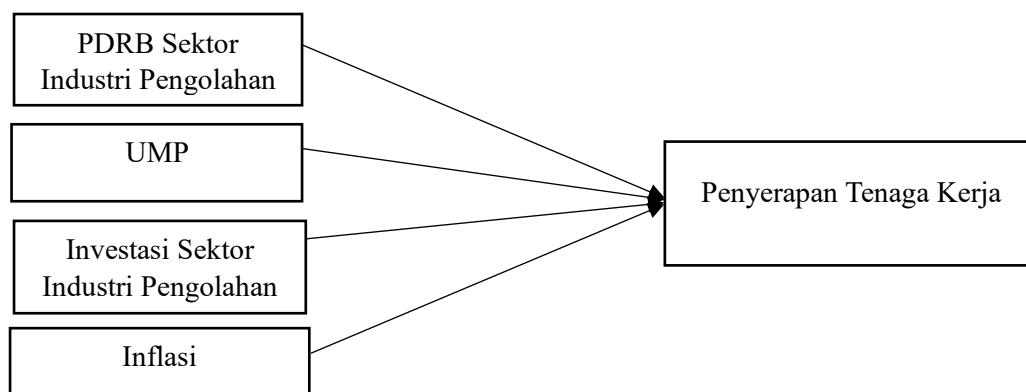
Penelitian kurva Philips beranggapan bahwa apabila tingkat inflasi naik, maka penyerapan tenaga kerja naik, dan sebaliknya apabila inflasi turun, maka jumlah penyerapan tenaga kerja akan mengalami penurunan (Nurhardiansyah *et al.*, 2017).

Menurut (Nanga, 2015) inflasi yang terjadi pada perekonomian di suatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan *output* dan tenaga kerja, dengan cara

memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya, tergantung intensitas inflasi yang terjadi. Apabila inflasi dirasa cukup tinggi maka akan mengakibatkan tingkat harga yang tinggi dan menyebabkan tingkat konsumsi menjadi rendah, hal ini akan mengakibatkan produsen menurunkan tingkat produksinya, dan mengakibatkan berkurangnya permintaan akan tenaga kerja, hal ini akan berakibat terhadap menurunnya penyerapan tenaga kerja

Apabila inflasi tergolong ringan maka keinginan-keinginan perusahaan untuk menambah *output* tentu juga dibarengi oleh penambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Pada kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila inflasi yang terjadi tergolong berat maka perusahaan akan mengurangi jumlah output akibat tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan juga akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja semakin berkurang dan pengangguran bertambah (Indradewa & Natha, 2015). Pernyataan yang dipaparkan tersebut sama dan didukung dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Komariyah, dkk (2020) yang mana hasil dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa Inflasi dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang telah dikemukakan tersebut.

Penelitian ini memiliki gambaran alur dalam pelaksanaan analisis berdasarkan latar belakang masalah, rumusan, serta tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikembangkan dalam dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan dan Investasi sektor industri pengolahan berpengaruh positif, sedangkan Upah Minimum Provinsi dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor industri pengolahan di Jawa Barat 2007-2022.
2. Diduga secara bersama-sama Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan, Upah Minimum Provinsi, Investasi sektor industri pengolahan dan Inflasi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor industri pengolahan di Jawa Barat 2007-2022.